

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021**



**TENTANG**

**MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI  
DALAM RANGKA RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN NOTA KEUANGAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN NOTA KEUANGAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Agustus 2020  
Waktu : 09.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
  1. Pembukaan;
  2. Skors;
  3. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya;
  4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
  1. Nama : H. SUPADI
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
  1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

## **VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Ketua Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Ketua Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Ketua Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 6 orang

## **VII. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang terhormat

- Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang;

Dan yang saya hormati

- Pj. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal

16 Agustus 2021 kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya.

Rapat paripurna ini dilaksanakan atas dasar hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 5 Agustus 2021, serta memperhatikan :

1. Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 28 Juli 2021 Nomor : B-564 / M / S / TU.00.04 / 07 / 2021 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021,
2. Keputusan rapat Panitia Tetap Peringatan HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Rembang Tahun 2021, yang mana rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden dilaksanakan secara terbatas, yaitu hanya dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi-Fraksi DPRD.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.***

Sebelum berlanjut ke acara pokok, terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini :

- ***Yang Pertama***

Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60, yang diperingati pada tanggal 14 Agustus 2021 kemarin, semoga Pramuka Kabupaten Rembang semakin jaya, dalam berbhakti serta membentuk dan menumbuhkan tunas-tunas muda yang memiliki watak, kepribadian, karakter, serta jati diri yang kokoh.

- ***Yang kedua,***

Besuk pagi tepatnya hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-76. Hari yang sangat bersejarah, hari yang tidak pernah dilupakan, hari dimana pada



tanggal dan bulan tersebut Indonesia lahir, Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah, dan Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya kepada dunia luar. Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata pemberian dari bangsa lain, namun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT disertai perjuangan para pejuang bangsa yang tak kenal lelah, pantang mundur, tak putus asa dan rela berkorban dalam mengusir penjajah. Sebagai penerus bangsa kita hendaknya selalu mengenang, selalu menghargai jasa-jasa para pejuang bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Untuk itu, melalui tema “ **Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh** “, dengan meneladani sikap dan jiwa para pahlawan pejuang bangsa, marilah kita untuk saling bekerjasama, saling bahu membahu, saling bersinergi satu sama yang lain, dan pantang menyerah dalam memutus rantai penyebaran covid 19 yang telah melanda ini, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan covid dan nantinya Kabupaten Rembang dapat terbebas dari pandemi Covid 19. Amiin Ya Robbal Alamiin.

*Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.*

Marilah kita lanjutkan ke acara pokok.

Sesuai laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 10 orang. Sehubungan rapat paripurna ini tidak mengambil keputusan, yang pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan jumlah fisik anggota DPRD yang hadir, maka dengan mengucap ” *Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.40 WIB Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya hari ini saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.*

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda pada rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Skorsing Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya;
3. Penutup.

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.*

Marilah kita ikuti acara kedua, yang merupakan agenda pokok rapat paripurna ini, yaitu **Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya.**

Untuk keperluan tersebut, maka rapat paripurna saya skors.

*( Ketuk palu 1 kali )*

**==== MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI  
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN ====**

Pidato presiden telah selesai, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

*( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati*

Dengan telah kita ikuti dan dengarkan bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen

Pendukungnya, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Sebelum saya akhiri, untuk mengenang, menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita kepada para pejuang dan pendahulu kita, serta untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama kita pekikkan: **..”MERDEKA” ..”MERDEKA” ..”MERDEKA” .**

Akhirnya dengan mengucap *”Alhamdulillahirobbil’alamin”* tepat pukul 11.46 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup.

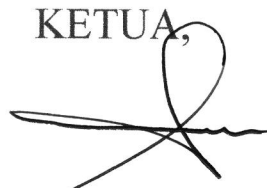
*( Ketuk palu 3 kali )*

Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Sekian. **Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



**H. SUPADI**

SEKRETARIS,



**Drs. DRUPODO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH                      PARIPURNA                      TENTANG  
MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM  
RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN NOTA KEUANGAN  
BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA**

---

LAMPIRAN I                      : Daftar Hadir Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD,  
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pj. Sekda,  
Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten  
Administrasi Umum dan Sekretaris DPRD ;

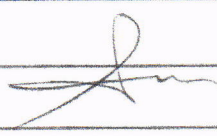
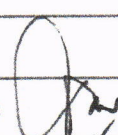
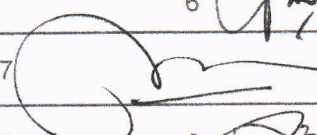
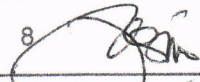
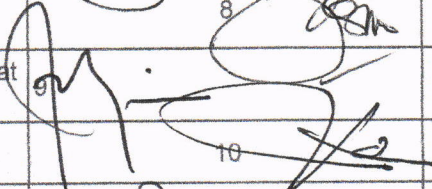
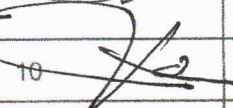
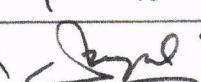
LAMPIRAN II                      : Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian  
RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota  
Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya;



## DAFTAR HADIR

### RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN NOTA KEUANGAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA

HARI/TANGGAL : SENIN 16 AGUSTUS 2021  
PUKUL : 10.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		✓
2	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	2	✓
3	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	3	
4	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Ketua Fraksi PPP	5	
6	ILYAS /M. Subawoto	Ketua Fraksi PKB	6 	
7	MASHADI, S.Pd, M.M.	Ketua Fraksi Nasdem	7 	
8	JASMANI	Ketua Fraksi PDI Perjuangan	8 	
9	MUGIYARTO, S.T. /Agar P	Ketua Fraksi Demokrat Hanura	9 	
10	AGUS SUTRISNO	Ketua Fraksi KIS	10 	
11	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris DPRD	11 	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	

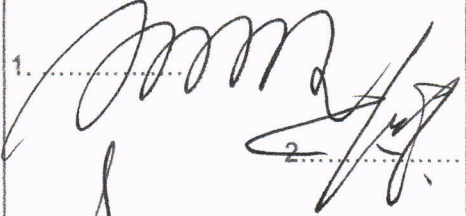
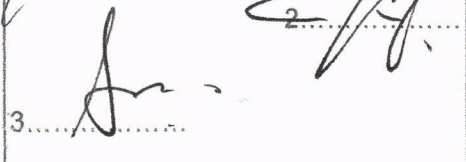

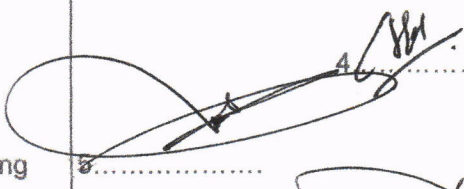

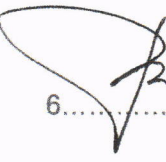


Keterangan :



**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA**  
**PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN NOTA KEUANGAN BESERTA DOKUMEN**  
**PENDUKUNGNYA**

**HARI/TANGGAL : SENIN 16 AGUSTUS 2021**

**PUKUL : 10.30 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	<u>SYAHRUL JUSTIKA SUBUKI</u>	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	<u>ALIF YUNAN. N.</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<u>DONAN WIRAYU</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>Dandy Ario Yustina</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<u>Nur Azizah</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	EDY SUPRIYANTA, ATD,S.H.,M.M.	Pj. Sekertaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



**Drs. DRUPODO, M.Si**  
 NIP. 19670421 199303 1 009

**SAMBUTAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN NOTA  
KEUANGAN BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA**

---

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Sampai saat ini, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY).

Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya

saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Hadirin yang saya muliakan,

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang kami gunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan



bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil.

Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyetatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Hadirin yang saya muliakan,

Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.

Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN.

Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, yang diarahkan pada: Melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.

Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal: peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak; pemerataan sarana prasarana pendidikan; serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain: mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk: mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan.

Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/ Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat.

Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang difokuskan pada: meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas; meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.

Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan.



Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni: tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Sementara itu, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui: perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap Produk Domestik Bruto.

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali.

Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan rida-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka!

Terima kasih,

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.*